

Dampak Kebijakan Politik Etis Belanda terhadap Masyarakat Indonesia

Tiara Niammusyfh Pasaribu¹ Juan Carlos Ginting² Adinda Dwi Saputri³

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email: tiaraniammusyfh@gmail.com¹ juancarlossaragih2005@gmail.com²
adindadwisaputri7@gmail.com³

Abstrak

Kedatangan pertama Belanda ke Indonesia pada abad ke-16, diikuti oleh perubahan kebijakan kolonial Hindia Belanda di Indonesia ketika akhir abad ke-19 dengan diperkenalkannya Kebijakan Politik Etis pada tahun 1901. Metode penelitian sejarah digunakan dalam jurnal ini menggunakan beberapa metode yaitu: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Sintesis, serta Penulisan Sejarah (Historiografi). Politik Etis, atau politik balas budi, menjadi sorotan utama, dimulai sekitar tahun 1890 sebagai respons terhadap tuntutan kaum liberal Belanda untuk memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Kolonialisme Belanda ditandai dengan eksploitasi dan penindasan terhadap masyarakat pribumi, dengan motivasi utama untuk keuntungan ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah. Kesimpulannya, abstrak tersebut menggambarkan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi yang menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pribumi.

Kata Kunci: Kebijakan kolonial Belanda, Kebijakan Politik Etis, Eksploitasi, Penindasan, Masyarakat Pribumi

Abstract

The first arrival of the Dutch to Indonesia in the 16th century, was followed by a changes in Dutch East Indies colonial policy in Indonesia at the end 19th century with the introduction of the Ethical Policy in 1901. The historical research method used in this journal, through the stages of Heuristics (Collection of Sources), Source Criticism, Interpretation and Synthesis, and Writing History (Historiography). Ethical Politics, or the politics of gratitude, is the main focus, starting around 1890 in response to demands from Dutch liberals to pay attention to the conditions of Indonesian society. Dutch colonialism was characterized by the exploitation and oppression of indigenous people, with the main motivation for economic gain through the spice trade. In conclusion, the abstract describes the history of Dutch colonialism in Indonesia which was influenced by political and economic policies that had a big impact on the lives of indigenous people.

Keywords: Dutch colonial policy, Ethical Political Policy, Exploitation, Oppression, Indigenous Peoples



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kapal bangsa Belanda memasuki perairan Indonesia pertama kalinya pada abad ke-16 atau lebih tepatnya pada tahun 1596. Kedatangan Belanda ini bukan kali pertama bangsa Eropa ke Indonesia. Beberapa dekade sebelumnya bangsa Portugis dan Spanyol telah menginjakkan kakinya di Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu mencari rempah-rempah (14671-50442-1-PB.Pdf, n.d.). Usaha mencari rempah-rempah yang dilakukan Belanda disebabkan oleh pengaruh Portugis dan Spanyol yang lebih dahulu datang ke Indonesia. Sebelum mencari rempah-rempah ke Indonesia, sebenarnya Belanda mendapat pasokan rempah-rempah dari ibu kota Portugis, Lisboa. Tapi, setelah Belanda dikuasai oleh Spanyol, mereka dilarang menerima pasokan rempah-rempah lagi dari Portugis (Taufiqurakhman, 2015). Pada akhir abad ke-19, tekanan internasional dan internal mendorong perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan Politik Etis, yang diperkenalkan pada tahun 1901,

bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat pribumi setelah berabad-abad mengalami eksploitasi di bawah Sistem Tanam Paksa dan kebijakan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial mulai mengembangkan infrastruktur, pendidikan, dan irigasi sebagai upaya "membayar utang moral" kepada Indonesia. (Ummah, 2019) Namun, meskipun tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, implementasi dari kebijakan ini seringkali tidak mencapai harapan masyarakat lokal. Sementara akses pendidikan dan pekerjaan mulai diperluas, kebijakan ini tetap lebih menguntungkan elite kolonial dan hanya sebagian kecil rakyat pribumi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan masih berkiblat pada pengolahan SDA (sumber daya alam) dan SDM (sumber daya manusia), yang kerap kali memperburuk ekonomi petani pribumi. (Weber et al., 2002) Pembuatan jurnal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, evaluasi terhadap kebijakan kolonial yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pribumi.

METODE PENELITIAN

Metode yang pakai untuk mengerjakan jurnal ini adalah Metode Penelitian Sejarah. Metode penelitian sejarah dalam jurnal ialah sistematis untuk mengungkap, menganalisis, dan menginterpretasikan peristiwa masa lampau berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Metode ini memiliki beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber). Proses dalam tahap ini ialah melakukan pencarian dan mengumpulkan sumber-sumber Sejarah yang sesuai dan sama dengan topik atau judul penelitian ini. Bisa berupa primer: Sumber yang berasal langsung dari masa lampau, seperti dokumen resmi, surat pribadi, artefak, foto, dan catatan perjalanan. Kemudian Sumber sekunder. Sumber yang membahas tentang masa lampau, seperti buku sejarah, artikel ilmiah, dan biografi'.
2. Kritik Sumber. Ini merupakan proses penilaian terhadap keaslian, kredibilitas, serta relevansi sumber-sumber yang telah dikumpulkan.
3. Interpretasi dan Sintesis. Tahap ini melibatkan analisis dan interpretasi informasi yang dikutip dari sumber yang sudah dikritik. Sejarawan berusaha untuk Menghubungkan fakta-fakta. Mencari hubungan sebab-akibat dan pola dalam peristiwa sejarah. Membuat Kesimpulan, Menarik intisari informasi dan analisisnya. kesimpulan berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan.
4. Penulisan Sejarah (Historiografi). Tahap ini melibatkan penyusunan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan yang sistematis, objektif, dan mudah dipahami. Penulisan sejarah harus bersifat Ilmiah, Objektif, dan Kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah politik etis lebih dikenal dengan sebutan politik balas budi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kemunculan awal dari politik etis ini sekitar tahun 1890 yang diawali oleh desakan dari kaum liberal Belanda. Di dalam desakannya, mereka menuntut agar supaya pemerintah Belanda lebih memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang telah memberikan sumbangan besar terhadap keuangan belanda. Selain itu, politik etis juga merupakan sebuah imbalan atas diberlakukannya sistem tanam paksa yang sudah ditetapkan oleh Belanda. Keberadaan politik etis ini tentunya memberikan berbagai pengaruh kepada bangsa Indonesia.(Hatama et al., 2022) Adapun beberapa pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kesejahteraan untuk semua orang. Pengaruh adanya politik etis bagi Indonesia adalah memberikan banyak kesejahteraan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dari

Trilogi Van Deventer yang mana masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mengikuti berbagai hal, misalnya saluran irigasi yang sudah dibangun oleh Belanda. Setidaknya masyarakat Indonesia di kala itu benar-benar bisa menikmati pengaruh positif dari politik etis. Pemerintah Belanda sudah berhasil membangun berbagai saluran irigasi di tahun 1885. Salah satu yang terkenal adalah bangunan irigasi di Demak dan Berantas yang memiliki luas 90.000 bau. Kemudian pada tahun 1902 meningkat menjadi 173.000 bau. Inilah yang nanti secara tidak langsung juga merupakan dampak politik etis di bidang ekonomi.

2. Menyempurnakan fasilitas yang sebelumnya sudah ada. Sebagai bentuk balas budi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, maka mereka melakukan berbagai perbaikan lainnya selain yang berkaitan dengan sektor pertanian. Pemerintah Belanda kemudian mulai menyalir sektor kependudukan dan juga pendidikan. Terobosan ini tentu merupakan hal yang sangat mulia. Akan banyak masyarakat Indonesia yang bisa menerima dan merasakan manfaat ini demi membuatnya menjadi masyarakat yang cerdas dan maju. (Syu'aisya, 2018) Namun memang politik etis yang satu ini kerap terbentur oleh pro dan kontra. Meskipun begitu, kita harus tetap memberikan apresiasi terhadap keputusan dari Pemerintah Belanda karena mampu membantu masyarakat Indonesia untuk berkembang dan terus melangkah maju sampai sekarang.
3. Meningkatkan SDM. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran politik etis membantu meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Sebenarnya hal ini merupakan salah satu jasa Pemerintah Belanda meskipun memang lebih banyak hal-hal negatif yang mereka berikan. Namun tetap saja kita tidak bisa memungkiri bahwa Belanda sudah membantu masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang pemikir. Belanda memang serius meningkatkan SDM masyarakat Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya pembangunan sekolah. Meskipun memang di dalam sekolah tersebut masih akan dibagi menjadi beberapa bagian dengan menyesuaikan siapa dan dari kalangan mana saja yang harus menuntut ilmu atau masuk ke kelas tersebut. Menurut (Asiva Noor Rachmayani, 2015) Beberapa sekolah yang sudah dibangun oleh Belanda antara lain:
 - HIS atau Hollandsch Indlandsche School yang setingkat SD
 - AMS atau Igemeene Middlebare School yang merupakan setingkat SMU
 - Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum pribumi (putra)
 - Technical Hoges School atau Sekolah Tinggi Teknik yang ada di Bandung. Kemudian di tahun 1902, mulai didirikan Sekolah Pertanian yang sekarang bernama IPB.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh hak-haknya. Pengaruh politik etis dapat menyadarkan masyarakat Indonesia untuk mulai berusaha mendapatkan hak-haknya. Seperti yang dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai menjadi masyarakat yang pemikir sehingga muncul ide untuk mendapatkan hak-haknya kembali dari Belanda.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial dan ekonomi bangsa ini selama lebih dari tiga abad penjajahan. Kebijakan tersebut secara umum berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan ekonomi Belanda, sekaligus menerapkan segregasi sosial yang memisahkan dan membedakan antara kelompok penduduk pribumi dan kolonial. Sementara ada upaya untuk melakukan reformasi pada akhir masa penjajahan, banyak kebijakan yang justru memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Menurut (Aji et al., 2020) Salah satu kebijakan ekonomi yang paling terkenal adalah:

1. Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Salah satu kebijakan paling terkenal dalam bidang ekonomi adalah *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa, yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Kebijakan ini mewajibkan petani pribumi untuk menyerahkan sebagian dari lahan mereka (biasanya 20%) untuk menanam tanaman

komoditas seperti kopi, gula, tembakau, dan nila yang diperdagangkan di pasar Eropa. Selain itu, petani juga harus menyerahkan sebagian dari hasil panen kepada pemerintah kolonial. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara Belanda yang telah terkuras setelah perang Napoleonik dan Perang Jawa. Meskipun sistem tanam paksa menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, sistem ini juga menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi petani Indonesia. Mereka harus menyerahkan sebagian besar tenaga kerja dan lahan mereka untuk menanam tanaman ekspor, sementara lahan yang tersisa sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. Akibatnya, terjadi kekurangan pangan, kelaparan, dan kemiskinan di banyak wilayah. Sistem ini juga mendorong penindasan oleh pejabat kolonial yang korup, yang sering kali memaksa petani untuk bekerja lebih keras dari yang diharuskan.

2. Penerapan Sistem Ekonomi Eksploitasi: Setelah akhir *Cultuurstelsel* pada pertengahan abad ke-19, Belanda mulai mendorong pengembangan sistem perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta Eropa. Kebijakan ini dikenal sebagai *Liberal Policy*, yang mengizinkan masuknya modal asing untuk mengelola perkebunan-perkebunan besar, terutama di Jawa dan Sumatra. Kebijakan ini memperkenalkan konsep ekonomi kapitalis di Indonesia, di mana tanah dan tenaga kerja diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan. (Ummah, 2019) Banyak tanah milik petani pribumi diambil alih oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, sementara petani diubah menjadi buruh perkebunan dengan upah rendah. Eksploitasi sumber daya alam seperti kopi, teh, karet, dan kelapa sawit dilakukan dengan cara yang sangat intensif, menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda, tetapi menyebabkan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan yang parah di Indonesia.
3. Perdagangan dan Pajak. Kebijakan ekonomi kolonial Belanda juga mencakup kontrol ketat atas perdagangan dan sistem pajak. Belanda memonopoli perdagangan komoditas utama seperti kopi, teh, dan rempah-rempah, serta mengenakan pajak yang tinggi terhadap penduduk pribumi. Sistem pajak yang memberatkan ini, termasuk pajak kepala (cukai individu), pajak tanah, dan pajak hasil bumi, menambah beban ekonomi masyarakat lokal. Pajak yang dikumpulkan sebagian besar digunakan untuk mendanai administrasi kolonial dan memperkuat dominasi Belanda, tanpa ada manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. (adar BakhshBaloch, 2017) Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan kepulauan Indonesia pada abad ke 16 atau pada 1596 masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sebagaimana 2 bangsa Eropa terakhir, kedatangan kapal bangsa Belanda ke nusantara semula dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah. Diawali dengan tujuan Belanda memasuki Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah menjadikan Belanda menjajah masyarakat Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan Masyarakat Indonesia. Kebijakan yang di rumuskan Belanda antara lain monopoli perdagangan dengan menguasai perdagangan di Indonesia, sistem pajak tanah yaitu dengan sumbangan wajib hasil tanaman perdagangan, tanam paksa dengan keharusan bagi rakyat untuk membayar dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka, dan kerja paksa dengan memaksa penduduk pribumi Indonesia untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat berat.

KESIMPULAN

Kolonialisme Belanda di Indonesia memiliki sejarah panjang yang diwarnai dengan eksploitasi dan penindasan terhadap masyarakat pribumi. Kedatangan Belanda pada abad ke-16, didorong oleh ambisi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, menandai awal dari penjajahan yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Motivasi utama Belanda adalah keuntungan ekonomi, yang mereka capai melalui berbagai kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang diterapkan pada tahun 1830 memaksa petani untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi,

gula, tembakau, dan nila, sementara kebutuhan pangan lokal terabaikan. Setelah berakhirnya Sistem Tanam Paksa, Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih liberal, namun tetap berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Perkebunan-perkebunan besar dikelola oleh perusahaan swasta Eropa, merampas tanah dan mengubah petani menjadi buruh dengan upah rendah. Monopoli perdagangan dan sistem pajak yang memberatkan juga menambah beban ekonomi masyarakat lokal. Meskipun Kebijakan Politik Etis yang diperkenalkan pada tahun 1901 bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat pribumi, implementasinya seringkali tidak mencapai harapan masyarakat lokal. Kebijakan ini cenderung menguntungkan elite kolonial dan hanya sebagian kecil rakyat pribumi yang merasakan manfaatnya. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pendidikan dan infrastruktur, eksploitasi ekonomi dan segregasi sosial yang diterapkan oleh Belanda selama berabad-abad telah meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Dampaknya masih terasa hingga saat ini, dalam bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adar Bakhsh Baloch, Q. (2017). No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan. 11(1), 92-105.
- Aji, R. N. B., Sumarno, & Hermawan, E. S. (2020). Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme SEJARAH Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan. Title. 6.
- Hatama, D. A. G. P., Anwar, & Batina, L. (2022). Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 7(1), 57-72.
- Syu'aisya, A. 'Aniin. (2018). Dinamika Pabrik Gula Modjopanggoong ... (Abu 'Aniin Syu'aisya') 642. *Prodi Ilmu Sejarah*, 3(5), 642-656.
- Taufiqurakhman. (2015). Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden. August, 9-10.
- Ummah, M. S. (2019). No analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan
- Weber, R., Kreisel, W., & Faust, H. (2002). Intervensi "Kebijakan Etis" Kolonial Padalanskap Budaya Sulawesi Tengah: Dampak Pemerintahan Belanda di Palu dan Lembah Kulawi, 1905-1942. *Lobo*, 4(1), 21-56.